



BULETIN APBN

Vol. VIII, Edisi 14, Juli 2023

Komitmen Negara Atas Perlindungan Anak Diragukan

p.3

Pengendalian Inflasi Volatile Food

p.7

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Masih Perlu Perhatian

p.12

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Penanggung Jawab

Dr. Ari Muliarta Ginting, S.E.,
M.S.E.

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Editor

Riza Aditya Syafri

Komitmen Negara Atas Perlindungan Anak Diragukan

p.3

Kasus kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Disisi lain, indikator akan perlindungan anak juga mengalami penurunan dan terkesan jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun 2024. Pemerintah juga belum terlalu fokus akan masalah ini yang dibuktikan dengan belanja KPPPA pada program perlindungan anak yang terus mengalami penurunan dari periode 2018-2020.

p.7

Pengendalian Inflasi Volatile Food

Inflasi di 2022 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 5,51%, year-on-year dan di 2023 juga masih tergolong tinggi di kisaran 5% year-on-year. Tingginya inflasi disebabkan oleh sektor energi dan pangan. Sektor energi sulit dikendalikan oleh pemerintah karena tergantung dari harga komoditas energi global. Sedangkan sektor pangan dapat dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah perlu mewaspadai inflasi pangan bergejolak atau Volatile Food (VF) Inflation. Permasalahan inflasi VF yang terjadi saat ini antara lain karena ketidakseimbangan permintaan dengan penawaran sehingga kurangnya pasokan beberapa bahan pangan, gangguan alam terutama perubahan iklim, dan inflasi pangan global. Kerja sama antar kelembagaan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah perlu diperkuat sehingga pengendalian inflasi pangan mampu mencapai inflasi nasional yang rendah dan stabil.

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Masih Perlu Perhatian

p.12

Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi hal penting dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) justru mengalami penurunan sejak tahun 2018. Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang terus meningkat namun pertumbuhan tersebut tidak terjadi di wilayah Papua. Selain itu pemerintah berhasil mendukung pembiayaan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) perempuan melalui PMN Mekaar namun belum semua pelaku UKM perempuan dapat menikmati program ini.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Komitmen Negara Atas Perlindungan Anak Diragukan

Orlando Raka Bestianta^{*)}

Abstrak

Kasus kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Disisi lain, indikator akan perlindungan anak juga mengalami penurunan dan terkesan jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun 2024. Pemerintah juga belum terlalu fokus akan masalah ini yang dibuktikan dengan belanja KPPPA pada program perlindungan anak yang terus mengalami penurunan dari periode 2018-2020.

Pada 23 Juli 2023 yang akan datang merupakan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-37. Penetapan HAN ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional, sebagai bentuk kepedulian negara agar anak-anak terlindungi dan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tidak hanya sebatas kepedulian saja, penetapan HAN secara filosofis ditujukan untuk menempatkan anak sebagai aset bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan dari negara guna menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik. Artinya, kualitas sumber daya manusia penerus arus pembangunan nasional juga sangat ditentukan sejauh mana negara memberikan perlindungan kepada anak.

Mengingat pentingnya perlindungan anak guna menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik di masa depan, pemerintah telah menetapkan beberapa indikator yang menjadi cerminan sejauh

mana negara memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024). Beberapa indikator tersebut merupakan tanggungjawab yang harus dicapai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), diantaranya yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), dan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA).

Merujuk pada RPJMN 2020-2024, IPA ditargetkan meningkat dari 66,26 menjadi 73,49. IPKA ditargetkan meningkat dari 77,03 menjadi 81,00. Sedangkan IPHA dari 63,67 menjadi 71,34. Dalam perjalanannya, ketiga indeks tersebut mengalami penurunan di 2021 dibandingkan dengan *baseline* tahun 2019 (tabel 1). Penurunan ketiga indeks yang relatif signifikan tersebut berimplikasi semakin jauh dan sulitnya memenuhi target RPJMN di akhir tahun 2024.

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Terkait KPPPA dalam RKP Tahun 2024

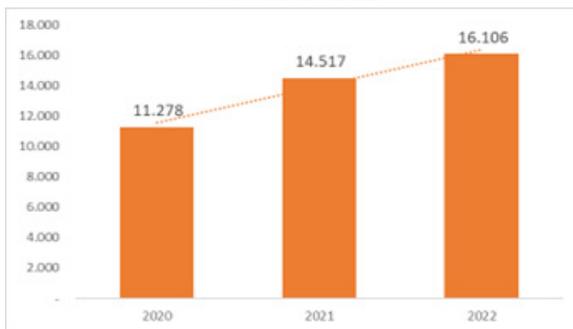
No	Indikator	Baseline 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2024
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
3.1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,26	66,89	61,38	73,49
KP1	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak				
1	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	77,03	73,11	73,59	81,00
2	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	63,67	65,56	58,34	71,34

Sumber: LAKIP KPPPA, RPJMN dan SIGA KemenPPPA (2023), diolah.

^{*)} Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Penurunan ketiga indeks tersebut sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari semakin meningkatnya kekerasan yang dihadapi anak di Indonesia pada 2019 hingga 2021. Di tahun 2020, KPPPA mencatat terdapat 11.278 jumlah kasus kekerasan pada anak. Angka tersebut meningkat menjadi 14.517 jumlah kasus atau meningkat 28,71 persen. Bahkan di tahun 2022 jumlah kekerasan anak masih terus meningkat (Gambar 1). Peningkatan jumlah kekerasan anak tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak anak yang tidak terlindungi dari kasus kekerasan. Peningkatan jumlah kekerasan pada anak ini akan berpotensi terus meningkat apabila tidak ada tindakan preventif yang ditempuh pemerintah.

Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2020-2022



Sumber: Simfoni PPA (2023), diolah.

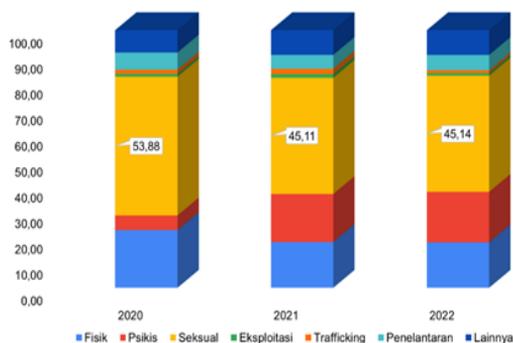
Kekerasan Anak Paling Sering Terjadi Di Rumah dan Kekerasan Seksual Paling Sering Dialami Anak

Berdasarkan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) KemenPPA, proporsi kejadian kekerasan anak berdasarkan tempat kejadian paling banyak terjadi di lingkungan rumah tangga, dengan rata-rata 49,68 persen selama periode 2020-2022. Proporsi kekerasan tertinggi kedua di fasilitas umum dengan rata-rata 14,52 persen dan kemudian diikuti lingkungan sekolah dengan rata-rata 5,6 persen.

Apabila dilihat dari jenis kekerasan, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban anak. Pada periode 2020-2022, rata-rata proporsi kekerasan seksual yang dialami anak sebesar 48,04 persen setiap tahunnya. Jumlah kasusnya juga

terus meningkat, dari 6.972 kasus di tahun 2020 menjadi 9.962 kasus di tahun 2022 atau meningkat 42,88 persen (Gambar 2).

Gambar 2. Proporsi Jenis Kekerasan Pada Anak Tahun 2020-2022 (%)



Sumber: Simfoni PPA (2023), diolah.

Kemudian apabila dilihat dari proporsi kekerasan anak berdasarkan latar belakang pendidikan, korban kekerasan paling banyak adalah anak berpendidikan SMP dengan rata-rata 29,92 persen pada periode 2020-2022. Kemudian disusul berpendidikan SD, dengan rata-rata sebesar 27,71 persen pada periode yang sama. Apabila digabungkan PAUD, TK, SD, dan SMP, jumlah korban anak dari gabungan jenjang pendidikan tersebut mencapai 60,84 persen dari total korban setiap tahunnya.

Anggaran KPPPA Belum Mencerminkan Kepedulian Terhadap Anak

Semakin meningkatnya kekerasan yang dialami anak menuntut perhatian pemerintah yang salah satunya tercermin dari alokasi belanja KPPPA sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab. Namun jika dilihat sisi belanja, KPPPA belum optimal menjalankan peran tanggungjawabnya dan cenderung belum terlalu memiliki perhatian terhadap perlindungan anak. Hal tersebut terlihat dari anggaran program perlindungan anak mengalami penurunan pada periode 2018-2020, di tengah kecenderungan angka kekerasan pada anak meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 anggaran program perlindungan anak mencapai Rp181,3 miliar atau sebesar 35,07 persen dari total anggaran KPPPA. Di tahun berikutnya

Gambar 3. Belanja Kementerian PPPA Program Perlindungan Anak (dalam miliar Rp)



Sumber: Nota Keuangan (2023), diolah.

mengalami penurunan sebesar Rp63,5 miliar dan secara persentase juga mengalami penurunan menjadi 24,53 persen dari total anggaran program. Pada tahun 2020 anggaran programnya turun drastis menjadi Rp32,1 miliar atau hanya sebesar 16,09 persen dari total anggaran program (Gambar 3).

Disamping itu, KPPPA juga mempunyai Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan PPA yang dilaksanakan dalam bentuk Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak (BOPPA) yang terdiri atas BOPPA Pelayanan, Pencegahan, dan Manajemen yang berfokus pada layanan pendampingan kekerasan.

Pada tahun 2024, Pemerintah telah menyetujui DAK Non Fisik PPA dengan usulan anggaran sebesar Rp146,4 miliar dengan sasaran salur antara lain Dinas Provinsi, UPTD PPA Provinsi, Dinas kabupaten/kota dan UPTD PPA kabupaten/kota. Berdasarkan Data TKDD DJPK Kemenkeu, realisasi tahun 2021 sebesar Rp77,79 miliar atau capaian realisasinya hanya 76,45 persen dari alokasi anggaran Rp101,75 miliar. Pada tahun 2022, alokasi anggaran BOPPA sebesar Rp120 miliar yang disalurkan pada 34 provinsi dan 216 kabupaten/kota dengan realisasi mencapai 95,04 persen. Sedangkan pada tahun 2023, alokasi anggaran BOPPA naik menjadi Rp132 miliar dengan besaran Rp301,8 juta, Rp451,8 juta, dan Rp601,8 juta yang disalurkan pada 34 provinsi dan 242 kabupaten/kota dengan realisasi anggaran per 12 Juli 2023 adalah sebesar 49,21 persen. Namun yang menjadi

catatan adalah penggunaan dana ini juga sebaiknya digunakan untuk penyediaan *safe house* mengingat angka kekerasan anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kemudian DAK NF PPA ini tidak hanya fokus pada anak saja, program ini juga berfokus pada perempuan.

Edukasi Di Satuan Pendidikan Hingga Penambahan Anggaran Dibutuhkan

Meningkatnya kekerasan pada anak menuntut pemerintah harus segera melakukan tindakan pencegahan agar tidak terus meningkat di masa mendatang. Hal ini perlu dilakukan agar anak sebagai aset bangsa mendapatkan perlindungan yang optimal guna menciptakan generasi penerus yang semakin baik di masa mendatang. Salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah yaitu: perlu adanya program atau kegiatan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan (khususnya PAUD hingga SMP) dan orang tua berbasis komunitas masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat proporsi kekerasan anak di lingkungan rumah tangga, fasilitas umum, dan satuan pendidikan relatif sangat tinggi. Dari sisi latar belakang pendidikan, korban anak paling banyak berlatar pendidikan PAUD hingga SMP. Khususnya PAUD hingga SMP, edukasi dilakukan dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kemendikbud Ristekdikti agar dapat menjadi muatan wajib dalam program kurikulum merdeka belajar pada satuan pendidikan.

Langkah selanjutnya yang dapat ditempuh yaitu adanya program atau kegiatan sosialisasi masif terkait Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (khususnya berkaitan dengan tindak pidana dan implikasi hukum tindak pidana). Upaya ini diperlukan agar masyarakat memahami berbagai norma (baik hak, kewajiban, sanksi pidana, dan lain-lain) berkaitan tindakan pidana kekerasan seksual, sehingga ada proses pencegahan yang bersumber dari kesadaran masyarakat. Tidak hanya sosialisasi saja, pemerintah juga harus mempercepat regulasi turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya: (i) Peraturan Pemerintah (PP) tentang Koordinasi dan Pemantauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS); (ii) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (iii) Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Edukasi dan sosialisasi tersebut sudah pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Namun di sisi lain, terdapat kecenderungan penurunan anggaran untuk program perlindungan anak dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penambahan anggaran untuk program perlindungan anak, baik anggaran KPPPA maupun DAK NF PPA. Penambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memberikan perlindungan kepada anak secara optimal. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan adanya aturan DAK NF PPA dapat digunakan sebagai sarana penyediaan *safe house* di daerah. Di satu sisi, ketersediaan *safe house* yang berfungsi untuk mengurangi kekerasan anak bahkan perempuan pada tingkat daerah. Di sisi lain, masyarakat akan lebih *aware* dengan kekerasan dengan adanya kehadiran pemerintah di tingkat daerah.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan agar program Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKALA), Kecamatan Layak Anak (KELANA), Kab/Kota Layak Anak (KLA), dan Provinsi Layak Anak (PROVILA) dapat dijalankan

dengan baik agar mampu mengoptimalkan perlindungan anak. Proses *monitoring* mulai dari desa hingga level pusat menjadi penting dilakukan guna menciptakan Indonesia Layak Anak (IDOLA) sebagai bentuk jaminan negara atas perlindungan anak di tahun 2030 mendatang.

Guna memberikan dampak yang signifikan, berbagai upaya di atas berfokus pada provinsi-provinsi dengan tindak kekerasan terhadap anak tertinggi, namun dengan tetap memperhatikan provinsi lainnya. Provinsi dimaksud antara lain Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan Bengkulu karena memiliki proporsi kekerasan anak yang tinggi.

Daftar Pustaka

Bappenas. 2020. Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Jakarta: Bappenas.

Kementerian Keuangan. 2023. Portal Data APBD dan TKDD. Diakses pada 11 Juli 2023 melalui <https://djpk.kemenkeu.go.id/>.

Kementerian Keuangan. 2023. Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian PPPA. 2020. Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2020. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kementerian PPPA. 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan KPPPA. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kementerian PPPA. 2023. SIGA KEMENPPA. Diakses pada tanggal 7 Juli 2023 melalui <https://siga.kemenpppa.go.id/>.

Kementerian PPPA. 2023. Simfoni PPPA. Diakses pada tanggal 7 Juli 2023 melalui <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional.

Pengendalian Inflasi Volatile Food

Jesly Yuriaty Panjaitan^{*)}

Abstrak

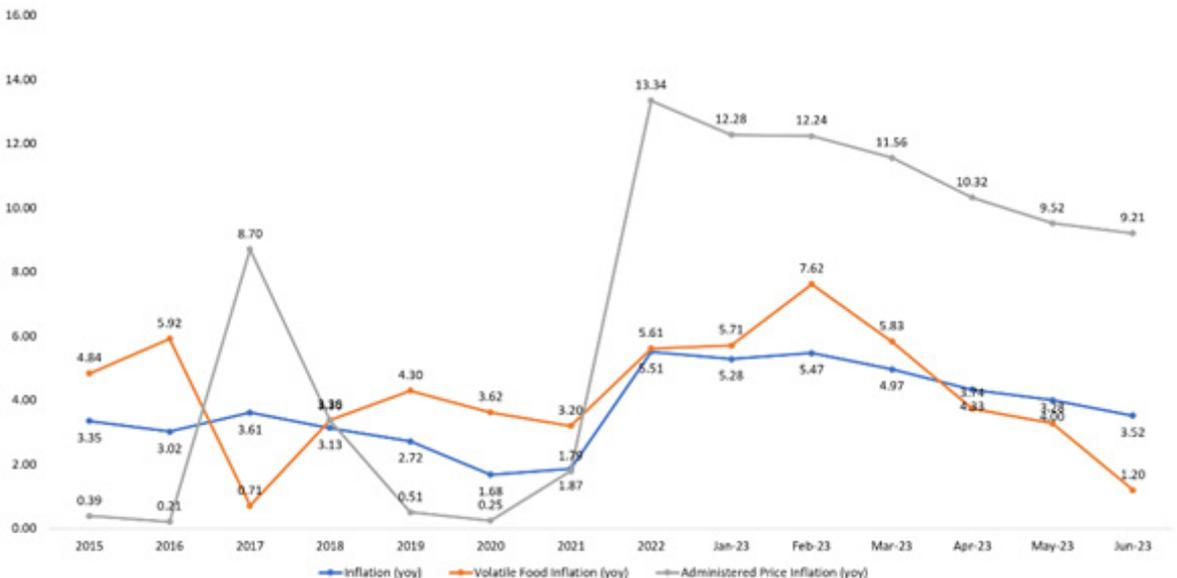
Inflasi di 2022 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 5,51 persen, year-on-year dan di 2023 juga masih tergolong tinggi di kisaran 5 persen year-on-year. Tingginya inflasi disebabkan oleh sektor energi dan pangan. Sektor energi sulit dikendalikan oleh pemerintah karena tergantung dari harga komoditas energi global. Sedangkan sektor pangan dapat dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah perlu mewaspadai inflasi pangan bergejolak atau Volatile Food (VF) Inflation. Permasalahan inflasi VF yang terjadi saat ini antara lain karena ketidakseimbangan permintaan dengan penawaran sehingga kurangnya pasokan beberapa bahan pangan, gangguan alam terutama perubahan iklim, dan inflasi pangan global. Kerja sama antar kelembagaan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah perlu diperkuat sehingga pengendalian inflasi pangan mampu mencapai inflasi nasional yang rendah dan stabil.

Selama periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi 2015-2019, inflasi mampu dikelola dan dikendalikan dengan baik pada kisaran 3 ± 1 persen (Gambar 1). Di periode kedua, inflasi mengalami penurunan yang cukup drastis di bawah 2 persen pada tahun 2020-2021. Penurunan inflasi tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020.

Pada tahun 2022, inflasi mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa pemerintahan

Presiden Jokowi, yakni mencapai 5,51 persen, year-on-year (yoy). Tingginya inflasi tersebut disebabkan oleh pemulihan ekonomi yang semakin baik, namun dari sisi penawaran masih terdapat disrupsi yang menyebabkan ketidakseimbangan kenaikan daya beli (permintaan) dengan penawaran. Ketidakseimbangan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga energi dan harga pangan yang memicu inflasi di dalam negeri. Hal tersebut terlihat dari kelompok *Administered Prices inflation*

Gambar 1. Inflasi (year on year) 2015 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), diolah.

^{*)} Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

sebesar 13,34 persen. Komoditas energi menyumbang 16,88 persen (yoy) terhadap *Administered Prices Inflation*. Inflasi yang dipicu oleh komoditas energi ini merupakan sumber inflasi yang sulit dikendalikan oleh pemerintah, mengingat Indonesia sejak tahun 2004 telah menjadi *net oil importer*.

Selain harga energi, pemicu lain tingginya inflasi di tahun 2022 adalah harga pangan. Hal tersebut juga terlihat dari kelompok *Volatile Food (VF)* yang juga meningkat tajam sebesar 5,61 persen di 2022. Badan Pusat Statistik (2023) mencatat komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi (yoy), yaitu: beras sebesar 0,19 persen, telur ayam ras sebesar 0,13 persen, ikan segar sebesar 0,10 persen, bawang merah sebesar 0,09 persen, tomat dan tahu mentah masing-masing sebesar 0,05 persen.

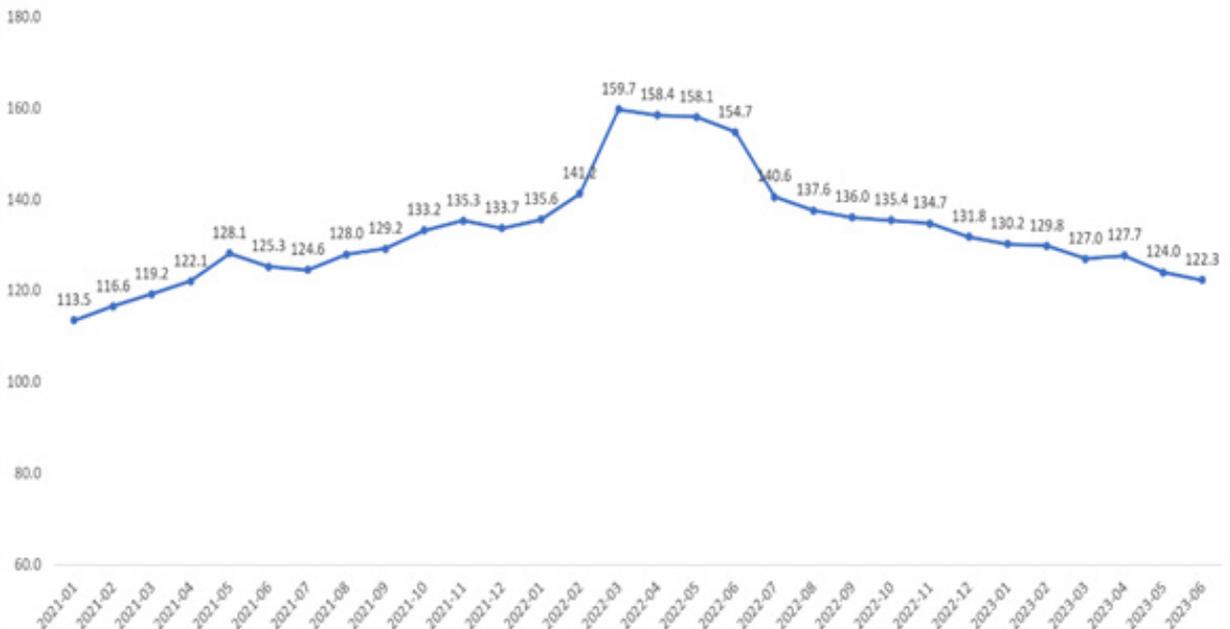
Pada akhir semester I tahun 2023, inflasi cenderung menurun menjadi 3,5 persen dan kembali pada kisaran sasaran 3+1 persen. Penurunan inflasi ini sejalan dengan tren penurunan *index* harga pangan dunia yang ditunjukkan dengan data dari Food and Agriculture Organization (FAO) *food price index* sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.

Meskipun sudah mengalami penurunan, namun *index* harga pangan dunia per Juni 2023 masih lebih tinggi dari harga Januari 2021. Fenomena tahun 2022 hingga semester I tahun 2023 menunjukkan tingginya inflasi dapat dikendalikan pemerintah apabila pemerintah mampu mengendalikan inflasi yang bersumber dari harga pangan.

Pengendalian Inflasi Pangan

Data dari BPS mencatat inflasi pangan tahun 2023 disebabkan oleh kurangnya pasokan seperti bahan pakan untuk ayam ras (seperti jagung), komoditas bawang putih dan komoditas beras. Permasalahan kenaikan harga pangan atau inflasi VF ini disebabkan oleh ketidakseimbangan *supply demand* pangan. Ketidakseimbangan ini dapat mengganggu ketersediaan pasokan antar daerah. Oleh karena itu, pengendalian inflasi pangan terkait ketidakseimbangan *supply demand* pangan dapat melalui integrasi kebijakan yang menyentuh dari sisi hulu hingga hilir, termasuk kebijakan pengelolaan stok pangan domestik, keterjangkauan harga pangan, serta distribusi di seluruh wilayah. Proses distribusi harus didukung infrastruktur pertanian dan teknologi yang memadai

Gambar 2. FAO Food Price Index Tahun 2021 – 2023



Sumber: FAO (2023), diolah.

sehingga terwujud pasar yang lebih efisien. Anggaran sarana prasarana yang pro-petani atau yang mendukung sektor pertanian seperti inovasi benih/bibit unggul juga perlu ditingkatkan, sehingga kurangnya pasokan komoditas pangan dapat diatasi.

Kurangnya pasokan bahan pangan juga menjadi alasan untuk melakukan impor bahan pangan. Untuk mengatasi ketergantungan impor pangan, pemerintah perlu melakukan perhitungan cadangan pangan dengan cepat, aktual dan tepat. Impor pangan terkait dengan inflasi pangan global yang disebabkan oleh geopolitik dan perang Rusia-Ukraina. Hal ini berdampak kepada pembatasan ekspor minyak dan gas yang sebagai bahan baku industri pupuk. Rusia merupakan eksportir pupuk terbesar di dunia dan negara pemasok pupuk terbesar ketiga untuk Indonesia, sehingga menyebabkan harga pupuk menjadi sangat tinggi. Ketika harga pupuk tinggi maka harga bahan pangan menjadi tinggi. Untuk itu, perlu ada upaya pemerintah mengkaji anggaran subsidi pupuk dan pemerintah dapat fokus kepada pemberian mulas dan bahan organik untuk meningkatkan kesuburan tanah, guna mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.

Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

Berdasarkan data BMKG, dampak perubahan iklim yakni perkembangan peningkatan suhu permukaan di Samudera Pasifik mengindikasikan probabilitas tinggi akan terjadinya fenomena *El Nino* pada semester II 2023. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap sektor pertanian. Karena fenomena *El Nino* inilah, pemerintah melakukan impor komoditas beras di kuartal pertama 2023 yang disebabkan oleh kurangnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sampai akhir tahun 2023.

Faktor gangguan alam atau dampak perubahan iklim masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi pangan, karena terkait *force majeure* (di luar kendali manusia). Sehingga, upaya mereduksi perubahan iklim ini adalah

upaya penyesuaian diri makhluk hidup baik manusia maupun alam terhadap dampak perubahan iklim yang sedang maupun yang akan terjadi dengan cara meminimalisasi kerugian atau bahkan memanfaatkan peluang dari fenomena perubahan tersebut (Parry, 2007). Dengan kata lain, pengendalian inflasi pangan yang dapat dilakukan pemerintah dapat berupa mitigasi dan adaptasi.

Mitigasi dan adaptasi ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik daerah dimana tergantung pasokan antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga dibutuhkan teknik pengendalian yang berbeda pula. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi negeri ini. Karena Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan terletak di *ring of fire* menyebabkan banyaknya risiko gangguan alam seperti longsor, banjir, badai, dan lain-lain. Selain itu, dampak perubahan iklim membuat musim kemarau yang terlalu panjang atau curah hujan yang terlalu tinggi sehingga berdampak buruk bagi sektor pertanian dan akan mengganggu ketersediaan pasokan pangan. Berdasarkan BMKG, sejumlah wilayah di Indonesia (28 persen wilayah) telah memasuki musim kemarau sejak Mei 2023. Peningkatan jumlah wilayah yang telah memasuki musim kemarau terutama terjadi sejak minggu ke-III Mei 2023. Wilayah yang telah memasuki musim kemarau antara lain sebagian Sumatera (Aceh dan Sumatera Utara bagian Timur; Riau, Bengkulu, dan Lampung bagian selatan), sebagian Jawa (DKI Jakarta; Banten dan Jawa Barat bagian utara; sebagian Jawa Timur dan Jawa Tengah), sebagian Balinusra, sebagian Sulawesi (Gorontalo, Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah), dan sebagian Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Sedangkan untuk curah hujan tinggi dan sangat tinggi antara lain sebagian Aceh bagian Barat dan Timur, sebagian Sumatera Utara bagian Utara dan Timur, Sumatera Barat bagian Utara, sebagian Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara bagian Utara, sebagian Kalimantan Timur bagian barat, sebagian Sulawesi Selatan bagian utara, sebagian Maluku bagian

Barat dan Tengah, sebagian Papua bagian Tengah. Dengan prediksi dari BMKG tersebut, kerja sama antar kelembagaan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah perlu diperkuat. sehingga dapat diantisipasi dampak perubahan iklim.

Terkait dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian dan pasokan pangan, beberapa strategi yang cukup komprehensif disampaikan oleh Nurdin (2011) antara lain:

Pertama, strategi jangka pendek antara lain pengolahan tanah minimum, efisiensi penggunaan air, penentuan waktu tanam berdasarkan unsur iklim yang valid dan seri data yang lebih panjang, penentuan pola tanam yang tepat, sistem tumpang sari dan tumpang gilir, pemilihan varietas tanaman yang unggul dan toleran terhadap kekeringan dan berumur pendek sebagai antisipasi fenomena terjadi *El Nino*, pemantauan serangan hama dan penyakit, penggunaan pemecah angin, pemberian mulas dan bahan organik untuk meningkatkan kesuburan tanah dan penerapan teknik konservasi tanah dan air.

Kedua, strategi jangka menengah antara lain pemantauan kontinu fenomena perubahan unsur-unsur iklim, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, peningkatan pembangunan jaringan irigasi teknis, penerapan teknis konservasi tanah dan air, pembentukan kelembagaan pengelola dan pemanfaatan air dan pemberdayaan petani melalui pembinaan dan pembimbingan untuk menghadapi perubahan dan anomali iklim terhadap usaha pertanian.

Ketiga, strategi jangka panjang antara lain perencanaan pembangunan sektor pertanian yang lebih terpadu, sistematis dan komprehensif, pelibatan masyarakat secara partisipatif, pola koordinasi yang baik antar instansi pemerintah, pemantauan areal yang sering terkena bencana akibat perubahan dan anomali iklim secara berkala dan berkesinambungan, reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan

pendekatan daerah aliran sungai, pemanfaatan teknologi membantu upaya prediksi perubahan iklim untuk mengurangi risiko kegagalan panen, penyebarluasan informasi iklim dan cuaca secara cepat, tepat dan aktual, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian.

Selain strategi-strategi di atas, strategi yang dapat dilakukan pemerintah antara lain pemerintah dapat menaikkan anggaran ketahanan pangan yang fokus kepada pro-petani dan perlu mengkaji kembali anggaran subsidi pupuk serta tetap menyalurkan program perlindungan sosial. Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan dana dari APBD dan Pendapatan Asli Daerah, termasuk penggunaan Belanja Tidak Terduga dan belanja subsidi, serta optimalisasi penyerapan dana transfer. Dengan terkendalinya kenaikan harga pangan di daerah maka inflasi nasional pun dapat terjaga rendah dan stabil, yang bermuara pada terwujudnya kedaulatan pangan.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2023. Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bank Indonesia. 2023. Analisis Inflasi TPIP Januari - Maret 2023. Bank Indonesia: Jakarta.

Bank Indonesia. 2023. Laporan Nusantara Januari - April 2023. Bank Indonesia: Jakarta.

Bank Indonesia. 2023. Inflasi Juni 2023 Kembali Ke Dalam Sasaran. diakses pada 14 Juli 2023 melalui https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2517623.aspx.

CNN Indonesia. 2023. Kemenkeu Kucurkan Rp104 T Demi Jaga Ketahanan Pangan Tahun Ini. diakses pada 7 Juli 2023 pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230309123716-532-922858/kemenkeu-kucurkan-rp104-t-demi-jaga-ketahanan-pangan-tahun-ini>.

Food and Agriculture Organization. 2023. *Food Price Index*. diakses melalui

- <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/>
- Hasson R., Lofgren A. Dan Visser, M. 2010. Climate Change in A Public Goods Game: Investment Decision in Mitigation Versus Adaptation. *Ecological Economics Journal*.
- Kementerian Keuangan. 2023. Nota Keuangan RAPBN 2023.
- Kementerian Keuangan. 2023. Inflasi Juni 2023 Lanjutkan Tren Penurunan. diakses pada 14 Juli 2023 melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Inflasi-Juni-2023-Lanjutkan-Tren-Penurunan>.
- Kompas TV. 2022. Ironi RI, Negeri Swasembada Beras tapi Harganya Naik Bikin Inflasi Tinggi. diakses pada 7 Juli 2023 pada https://www.kompas.tv/bisnis/328598/ironi-ri-negeri-swasembada-beras-tapi-harganya-naik-bikin-inflasi-tinggi#google_vignette.
- Nurdin. 2011. Antisipasi perubahan iklim untuk keberlanjutan ketahanan pangan, *Jurnal Kebijakan Publik* Edisi 4/November 2011.
- Parry, ML. 2007. *Climate Change 2007: Impact, Adaptation and Vulnerability*.
- Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara. 2023. Focus Group Discussion: Alternatif Strategi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat). Bandung: Jawa Barat.
- RRI.go.id. 2023. Mewujudkan Swasembada Beras secara Berkesinambungan. diakses pada 7 Juli 2023 pada <https://www.rri.go.id/bali/opini/257602/mewujudkan-swasembada-beras-secara-berkesinambungan>.
- Tempo.co. 2023. Sri Mulyani Sebut *Volatile Food* Sumber Inflasi yang Harus Diwaspadai. diakses pada 7 Juli 2023 pada <https://bisnis.tempo.co/read/1702752/sri-mulyani-sebut-volatile-food-sumber-inflasi-yang-harus-diwaspadai>.

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Masih Perlu Perhatian

Ricka Wardianingsih*)
Ervita Luluk Zahara**)

Abstrak

Pengarusutamaan gender (PUG) menjadi hal penting dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) justru mengalami penurunan sejak tahun 2018. Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang terus meningkat namun pertumbuhan tersebut tidak terjadi di wilayah Papua. Selain itu pemerintah berhasil mendukung pembiayaan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) perempuan melalui PMN Mekaar namun belum semua pelaku UKM perempuan dapat menikmati program ini.

Di Indonesia, pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan merupakan salah satu isu utama pembangunan nasional. Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG disebutkan bahwa PUG merupakan proses untuk menjamin kesetaraan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam hal mengakses dan mengontrol sumber daya, serta memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan di setiap tahapan proses pembangunan dan kebijakan. Hal tersebut diperkuat di dalam salah satu tujuan RPJMN 2020-2024, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dalam mencapai kesetaraan gender dengan program PUG.

Program PUG menjadi penting mengingat adanya hubungan antara PUG dalam pembangunan dengan angka kemiskinan. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu negara untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan (Naskah Akademik Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Tengah, 2021). Dengan demikian, kesetaraan akses antara pria dan wanita diperlukan guna meningkatkan produktivitas di setiap lini pembangunan.

Dalam rangka memastikan strategi program PUG dapat terlaksana dengan baik, penyusunan strategi anggaran melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) perlu dilakukan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mekanisme PPRG merupakan *budget tagging* tematik Anggaran Responsif Gender (ARG) pada rincian dokumen perencanaan pembangunan kementerian/ lembaga (Renja K/L). Secara garis besar, *budget tagging* tematik ARG mengalami peningkatan sejak 2018 hingga tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 *budget tagging* tematik ARG mengalami penurunan, hanya 17 K/L yang konsisten melakukan *budget tagging* ARG selama 2018-2021 (Badan Kebijakan Fiskal, 2022).

KemenPPPA yang bertanggungjawab menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender justru menurunkan ARG. Pada tahun 2018, KemenPPPA menganggarkan Rp248,1 miliar dan tahun 2021 hanya Rp17,8 miliar. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang serius dalam mendukung strategi program PUG. Mengingat pentingnya PUG, pemerintah perlu terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan K/L dalam melakukan *budget tagging* tematik ARG.

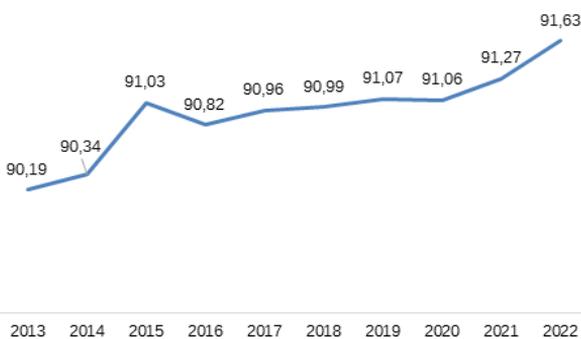
*) Analisis APBN Non-ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

***) Analisis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Pembangunan Gender Antar Wilayah Belum Merata

Dalam mengukur dan mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender, pemerintah menggunakan beberapa indikator yang dapat digunakan, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat capaian IPG tahun 2022 sebesar 91,63, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 91,27 (Gambar 1). Berdasarkan pembentuk indeksinya, capaian usia harapan hidup perempuan sebesar 73,8 tahun dan laki-laki sebesar 69,9 tahun, harapan lama sekolah laki-laki 12,96 tahun dan perempuan yaitu sebesar 13,28 tahun, rata-rata lama sekolah perempuan 8,39 tahun dan laki-laki 8,99 tahun, serta rata-rata pendapatan per kapita perempuan Rp2,59 juta dan laki-laki Rp3,33 juta. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih adanya ketertinggalan perempuan di beberapa komponen pembentuknya.

Gambar 1. Perkembangan IPG Nasional 2013 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), diolah.

Apabila dilihat dari data runtu waktu, IPG mengalami kecenderungan meningkat setiap tahunnya di sepanjang tahun 2013-2022 (Gambar 1). Namun, peningkatan tersebut tidak didukung oleh pemerataan pembangunan gender antarwilayah di Indonesia (Gambar 2). Nilai IPG terendah di tahun 2022 yaitu Provinsi Papua, yakni sebesar 81,04. Sedangkan tertinggi adalah Provinsi Yogyakarta, sebesar 94,99. Selisih kedua provinsi cukup besar, yakni sebesar 13,95 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pembangunan di Provinsi Papua

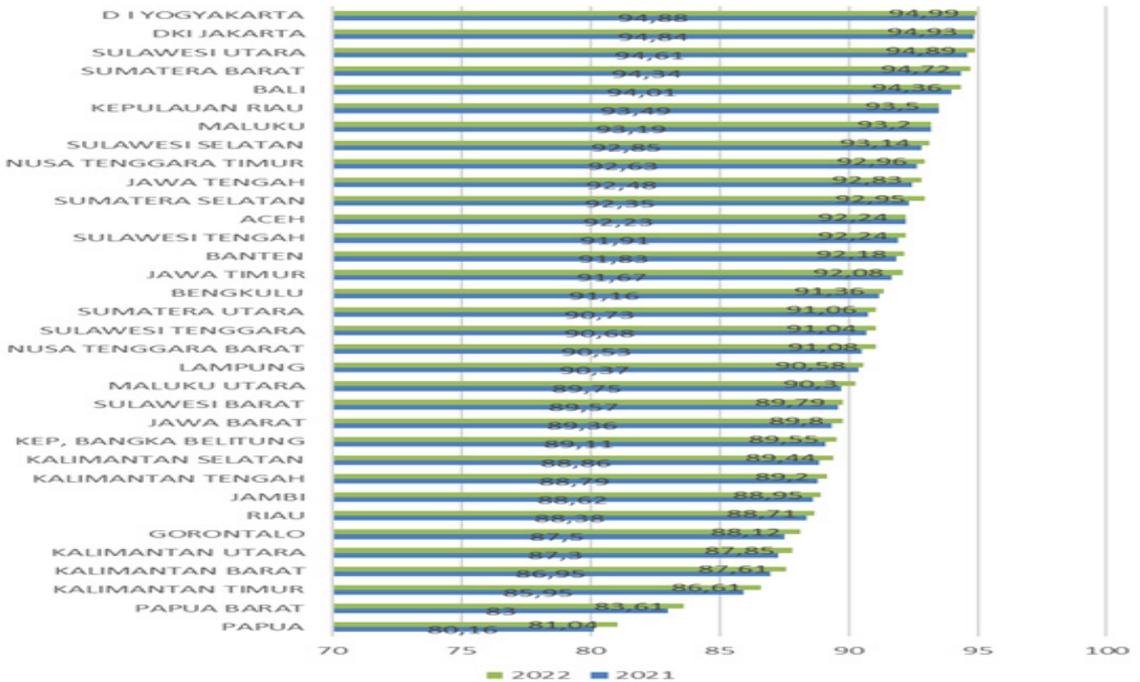
masih jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Yogyakarta.

Tingginya nilai IPG Provinsi Yogyakarta didorong oleh beberapa kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) D.I Yogyakarta. Diantaranya adalah Pemda D.I Yogyakarta telah berupaya meningkatkan akses perempuan dalam pembangunan, antara lain bidang kesehatan yaitu sosialisasi reproduksi dan juga jaminan persalinan (jampersal) yang mana sasarannya adalah perempuan. Dalam hal bidang pendidikan, Pemda D.I Yogyakarta secara aktif melakukan sosialisasi terhadap orang tua yang memiliki anak usia sekolah mengenai pentingnya dan manfaat pendidikan sehingga baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan akses kualitas pendidikan yang sama. Di bidang ekonomi, Pemda D.I Yogyakarta telah merancang pembangunan berbasis responsif gender sejak tahun 2008.

Berbeda dengan Provinsi Papua, kondisi geografis dan topografi Papua yang cakupan wilayah yang luas namun akses informasi dan transportasi yang terbatas menjadi penyebab rata-rata lama sekolah perempuan di Papua terendah di Indonesia, yakni hanya 6,29 tahun (BPS, 2022). Selain itu, norma budaya setempat juga menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah anak perempuan di Papua (Vetaroy, 2019). Oleh karena itu, PUG yang dijalankan pemerintah juga sebaiknya memperhatikan hambatan geografi, infrastruktur, dan norma sosial yang berbeda di setiap wilayah.

Dari aspek penganggaran, salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya komitmen Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam pengaplikasian PPRG. Hal ini terlihat dari penganggaran dan perencanaan kegiatan di Papua belum sepenuhnya mengintegrasikan dan mengidentifikasi isu gender. Akibatnya, program dan kegiatan yang disusun oleh Pemda Papua tak menutup kemungkinan bias gender. Masih rendahnya komitmen tersebut disebabkan masih lemahnya pemahaman para perencana program dan kegiatan mengenai isu gender. Oleh

Gambar 2. Perkembangan IPG Menurut Provinsi



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022), diolah.

karena itu, diperlukan peningkatan dan penguatan kualitas sumber daya manusia di seluruh proses pembangunan berbasis pengarusutamaan gender, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

Dukungan Bagi Pelaku Usaha Perempuan Masih Perlu Ditingkatkan

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) tahun 2021 menyebutkan bahwa pelaku usaha mikro Indonesia masih didominasi oleh perempuan, yakni 53,76 persen kepemilikan sektor UKM dimiliki oleh perempuan dengan 97 persen karyawannya adalah perempuan. Unit usaha yang dimiliki perempuan tersebut berkontribusi dalam perekonomian sebesar 61 persen. Angka ini menunjukkan bahwa begitu besarnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi.

Meskipun demikian, penelitian UNICEF pada tahun 2019 menemukan bahwa pelaku usaha perempuan masih menghadapi hambatan struktural akibat norma gender yang diskriminatif. Dalam penelitian yang dilakukan UNICEF di Thailand, Laos dan Indonesia terungkap,

bahwa wirausaha perempuan di Asia Tenggara menghadapi hambatan struktural yang lebih besar akibat norma gender yang diskriminatif, seperti beban pengasuhan tak berbayar yang tinggi, terbatasnya akses ke aset produktif, terbatasnya peluang untuk mengembangkan keterampilan yang sesuai, terbatasnya akses keuangan, tidak tersedianya jaringan kewirausahaan dan mentor (Katadata, 2022).

Dalam konteks di Indonesia, Laporan World Bank Group (2016) menjelaskan bahwa UKM yang dimiliki perempuan di Indonesia masih mengalami kekurangan pembiayaan dalam membangun usahanya. Pelaku usaha perempuan kesulitan memperoleh pinjaman yang disebabkan beberapa hal, antara lain masih adanya keraguan perbankan memberikan kredit kepada perempuan, prosedur pinjaman perbankan memberatkan bagi pelaku UKM perempuan, serta sedikitnya kreditur perempuan yang memiliki aset terdaftar atas nama pribadi sebagai jaminan.

Dalam mengatasi kendala permodalan tersebut, pemerintah sebenarnya sudah

berupaya memberikan dukungan. Salah satu dukungan pemerintah dalam memperluas akses pendanaan bagi perempuan yaitu program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) program pembiayaan ultra mikro (UMI) yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Adanya pinjaman modal dari PNM Mekaar diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga pelaku usaha perempuan. Namun program tersebut masih bersifat “*cost deferral*” (menunda biaya) dan hanya dapat dinikmati oleh UKM yang sudah memiliki pinjaman perbankan dengan *track record* yang baik.

Selain itu, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal UKM didominasi oleh usaha mikro yang rata-rata tidak berstatus badan hukum atau informal. Akibatnya berbagai program tersebut hanya dapat dinikmati oleh UKM yang sudah berstatus badan hukum atau formal. Padahal ekosistem yang mendukung perempuan seperti akses terhadap pendanaan, pelatihan, dan pasar ini penting untuk membuka peluang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk itu perlunya dukungan pemerintah dalam memberikan fasilitas akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku UKM perempuan. Pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha perempuan yang masih bersifat informal dan *unbankable* juga perlu dilakukan agar mampu bertransformasi menjadi UKM formal dan *bankable*. Transformasi tersebut diperlukan agar unit usaha yang dimiliki perempuan semakin mudah mengakses pembiayaan guna meningkatkan skala ekonomi usahanya.

Daftar Pustaka

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. 2022. Analisis Ketimpangan Gender Spasial dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Wilayah.

Badan Pusat Statistik. 2023. Indeks Pembangunan Gender (IPG). Diakses dari

<https://www.bps.go.id/indicator/40/463/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html>.

_____. 2022. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/40/501/1/angka-harapan-hidup-ahh-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html> pada 16 Juli 2023.

_____. 2022. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/40/457/1/angka-harapan-lama-sekolah-hls-menurut-jenis-kelamin.html>.

_____. 2022. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/40/459/1/rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-jenis-kelamin.html>.

_____. 2021. Keterlibatan Perempuan di Parlemen. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/40/464/1/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>

Katadata. 2022. Partisipasi Ekonomi Perempuan Indonesia Masih Timpang. Diakses dari <https://katadata.co.id/>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). 2022. Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2022. Jakarta: Kemen PPPA.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Tengah. 2021.

Vetaroy. 2019. Peran Pendidikan dalam Kesetaraan Gender di Papua. Diakses dari <https://bkd.papua.go.id/2019/12/23/peran-pendidikan-dalam-kesetaraangender-di-papua/> pada 16 Juli 2023.

World Bank Group. 2016. Laporan International Finance Corporation menunjukkan bahwa UKM yang dimiliki wanita membutuhkan pembiayaan sebesar \$6 miliar. World Bank Group. Diakses dari <https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=24833> pada 18 Juli 2023.



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

www.puskajianggaran.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @puskajianggaran

Twitter: @puskajianggaran

Youtube: Pusat Kajian Anggaran DPR RI

